



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya.....	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-5
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-6
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	
1	V-
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
.....	VI
-1	

BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

..... **VI**

I-1

BAB VIII. Penutup

..... **VI**

I-1

Daftar Tabel

Tabel

	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan..... II-7
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan II-7
2.3	Daftar Nama Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan II-8
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang II-12
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan II-17
2.6	Komprasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan..... II-18
2.18	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kab. Sampang II-19
2.11	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kab. Sampang II-20
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi Serta Permasalahan Pelayanan OPD III-3
3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... III-4
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kab. Sampang IV-2
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan V-2
5.2	Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang V-4
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan VI-1
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-1
7.2	Keterhubungan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 VII-2
7.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan VII-4
7.4	Cascading Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang VII-7
7.5	Indikator Kinerja Daerah PMDN 17..... VII-11

Daftar Gambar

Gambar / Diagram Halaman

2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	II-2
3.1	Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024.....	III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkat pemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap OPD.

Rencana strategis atau Renstra sendiri merupakan konsep yang digunakan dalam menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Salah satu fungsi dari Rencana strategis adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, acuan program/kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu tujuan tertentu. Melalui perencanaan strategis seluruh jajaran Dinas Perikanan berkomitmen untuk membangun tujuan yang konkrit dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan, meliputi kekuatan internal dan eksternal, termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

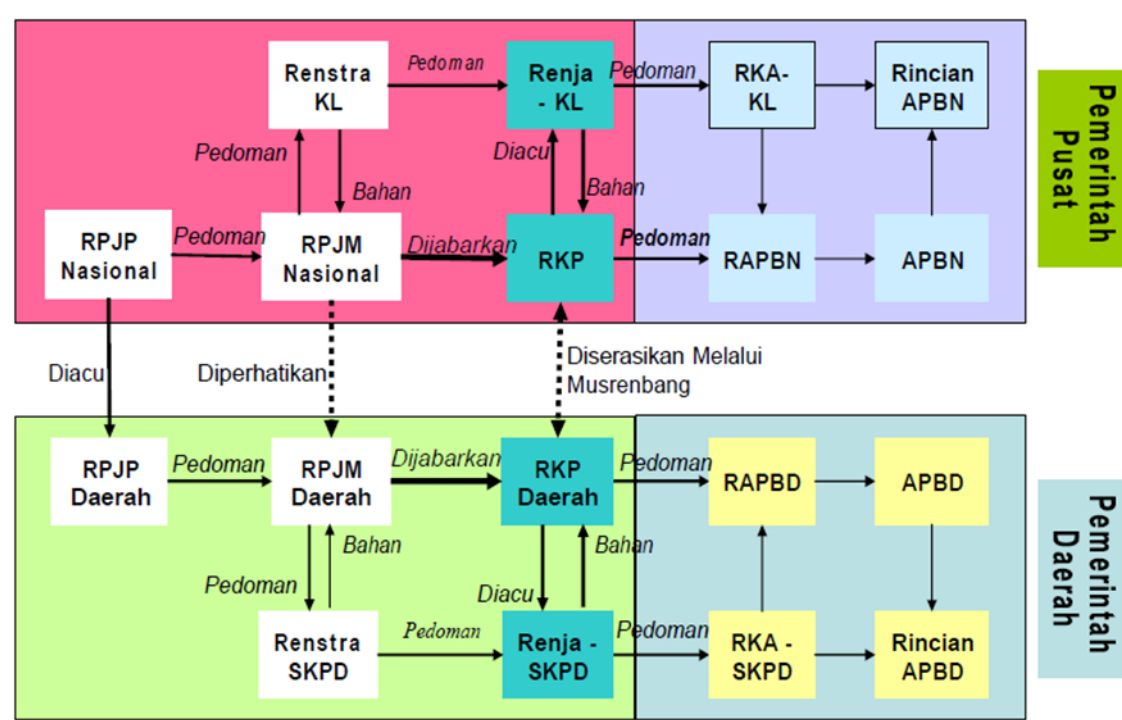
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 5 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2019-2024

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan. Perubahan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis - strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politislegislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi OPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019- 2024, dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan bukanlah dokumen perencanaan yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan dengan dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga berkaitan dengan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Selain mengacu pada RPJMD, tentunya dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diselaraskan dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan sinergisitas antara perencanaan di pusat, propinsi, dan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel serta selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai :

- 1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- 2. Tersedianya dokumen acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan;
- 3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

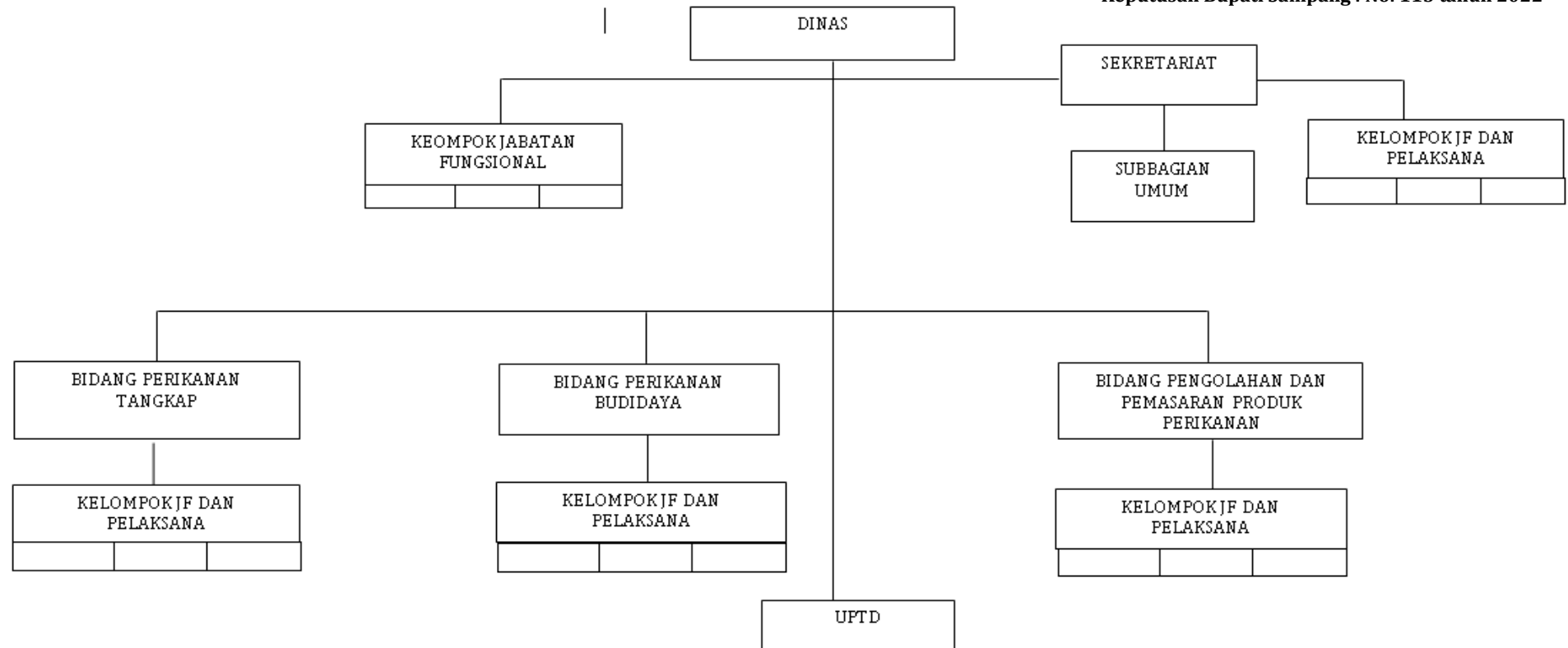
Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada lahirnya Perbup No. 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Secara umum kondisi internal Dinas Perikanan Kabupaten Sampang cukup kondusif dan relevan sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keputusan Bupati Sampang : No. 115 tahun 2022



Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas
Perikanan Kabupaten
Sampang

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan bidang Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun **Susunan Organisasi** Dinas Perikanan terdiri atas :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretaris, membawahi :**
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. **Bidang Perikanan Tangkap**
- d. **Bidang Perikanan Budidaya**
- e. **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan**
- f. **UPT Dinas ; dan**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan

masyarakat dan protocol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap dan ekosistem perairan umum;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi/kelembagaan nelayan;

- e. Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian jaminan mutu perikanan tangkap;
- f. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- g. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data perikanan tangkap; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakannya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan dan evaluasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- b. Penyiapan Perumusan, pemetaan dan pengembangan wilayah serta konservasi perikanan budidaya
- c. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya serta kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam;
- d. Penyiapan Pembinaan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan pengendalian lingkungan budidaya;
- e. Penyiapan Perumusan kebijakan penyediaan atau peningkatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- f. Fasilitasi petambak garam; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan. Untuk melaksanakannya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. Penyiapan Perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Penyiapan Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil

perikanan;

- d. Penyiapan Perumusan kebijakan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Penyiapan Perumusan penyajian dan pengolahan data perikanan;
- f. Penyiapan Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan promosi untuk akses pasar, logistic, pengolahan dan pemasaran produk perikanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh kepala perangkat daerah atas nama bupati.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

1. Jabatan

Dari komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang keseluruhan berjumlah 24 orang, terdiri dari :

- a. 6 Orang pejabat struktural
- b. 6 Orang fungsional

c. 12 Orang pelaksana

2. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina	IV	8
Penata	III	11
Pengatur	II	5
T Jumlah		24 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Penata (III) yaitu 11 orang.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	10
S1	8
D3	2
D2	-
D1	-
SLTA	4
SMP	-
SD	-
Jumlah	24

Sebesar 36,36% pegawai Dinas Perikanan merupakan lulusan pasca sarjana (S2) dan lulusan Sarjana (S1), 9% lulusan Diploma, 18,18% lulusan SLTA, dan 0% lulusan SMP dan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendidikan pegawai terbanyak di Dinas Perikanan merupakan lulusan Sarjana dan Pasca Sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Dari komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang keseluruhan 24 orang terdiri dari :

- Pegawai laki-laki sebanyak 14 orang
- Pegawai perempuan sebanyak 10 orang

Jumlah personel Laki-laki 52 % dan jumlah personel perempuan 48 %.

Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Perikanan antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yang artinya responsif gender.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perikanan Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan

No	Nama Barang/Jenis Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5
A	Golongan Tanah	Bidang	Baik	7
1	Tanah	Bidang	Baik	7
B	Kendaraan Roda 2	Unit	B = 8 KB = 31 RB = 5	44
C	Kendaraan Roda 4	Unit	KB	2
D	Alat Pendingin			
1	Kulkas/Lemari Pendingin	Unit	KB = 2 RB = 1	3
2	AC	Unit	KB	3
E	Personal Komputer			1
1	Laptop	Unit	KB =	2
2	Note Book	Unit	KB	6
F	Mesin Ketik	unit	KB	1
G	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
1	Rak buku/kembang	unit	KB	2
2	Filling Besi/Metal	Unit	KB	10

3	Lemari Kaca/Etalase	Unit	KB	3
4	Karpet/Permadani	Buah	KB	4
H	Alat Kantor Lainnya			
1	Facum Cleaner	Unit	KB	1
2	Finger Print	Unit	Baik	1
3	CCTV	Unit	Baik	1
I	Meubelair			
1	Lemari	Buah	KB	5
2	Meja Rapat	Buah	KB	4
3	Kursi Tamu	Buah	KB	1
4	Kursi Putar	Buah	KB	10
J	Alat Pembersih			
1	Mesin Pemotong Rumput	Unit	KB	1
K	Alat Rumah tangga lainnya (home use)			
1	Podium	Unit	Baik	1
L	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
1	Kamera Digital	Unit	KB	1
	Personal Komputer			
	Laptop	Unit	KB = 2 B = 9	11
	Note Book	Unit	KB	6
	Computer PC	Unit	KB	2
	CPU	Unit	KB	3
	Monitor	Unit	KB	2
	Printer	Unit	KB = 4 B = 11 RB = 1 B = 7	22
	Meja Kerja Pejabat			
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	KB	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	KB	1
	Meja Kerja Pegawai	Buah	KB	10
	Meja Kerja Staf	Buah	KB	8
	Meja Kerja	Buah	KB	12
	Meja Rapat Pejabat			
	Meja Rapat Panjang	Buah	KB	2
	Kursi Kerja Pejabat			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	KB	4
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	KB	3
	Lemari dan Arsip Pejabat			
	Lemari arsip	Buah	KB	7
	Peralatan Studio Video Dan Film			
	Camera Digital	Unit	RB	1
	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak			
	Mesin Laminating	Unit	KB	1
	Alat Komunikasi Telephone			

	Facsimile	Unit	KB	1
	loud speaker/sound system	Unit	KB	1
	Alat Laboratorium Umum			
	DO Meter	Unit	Baik	12
	Secci Disk	Unit	Baik	3
	Soil Ph Meter	Unit	Baik	2
	Refractometer	Unit	Baik	3
	Testkit	Unit	Baik	3
	Plankton Net	Unit	Baik	2
	Alkalinity Test	Unit	Baik	1

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana tetap dalam kondisi baik demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permerpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO	SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET IND. LAIN	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE						REALISASI						RASIOA CAPAIAN TAHUN KE					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Usaha Perikanan	Jumlah Produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun a. Laut			√	16.887,60	17.732	18.618,60	7.273,48	7418,95	7.567,33	9.296,58	9.347,40	7.130,86	7.543,71	6.965,59	9.336,25	55,04	55,35	38,30	103,71	93,88	123,35
		b. Perairan umum			√	14,32	29,19	14,90	23,22	23,68	24,15	28,90	28,82	22,77	17,73	21,16	18,2	201,8	98,73	152,81	76,35	89,35	75,36
2		Jumlah Produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun a. Kolam			√	622,8	629,2	635,3	625,00	648,1	654,6	29,05	34,84	50,05	60,18	62,48	101,318	46,64	55,37	78,78	96,29	111,83	15,47
		a. Tambak			√	2.497,8	2.770,7	2.548,2	7.982,00	2651,18	2704,20	274,57	524,98	655,99	750,14	662,17	808,199	109,92	189,48	257,43	93,97	24,97	297,51
3		Jumlah Produksi garam			√	223.3271	230.176	237.295	244.634	252.200	260.000	169,960.00	280,411.00	398,983.60	4,606.76	170,568.45	346,665.00	73,84	121,82	168,13	188,31	67,63	120

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 capaian indikator kinerja sasaran yang sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Jumlah produksi perikanan tangkap untuk laut lebih dari 100%, capaian indikator tersebut adalah 123,35 sedangkan untuk produksi Perairan Umum Daratan (PUD) tidak tercapai 100%, capaian indikator tersebut adalah 75,36.
2. Jumlah produksi perikanan budiya untuk indicator kolam kurang dari 50%, capaian indicator tersebut adalah 15,47%. Sedangkan untuk indicator tambak lebih dari 100%, capaian indicator tersebut adalah 297,51%.
3. Untuk indikator jumlah produksi garam capaian indicator tersebut adalah sebesar 100%.

Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. Dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.705.288.780	3.823.965.022	3.941.808.380	4.096.459.106,19	2.782.587.911	1.757.558.470	2.182.333.812	3.459.496.114	3.737.920.621	4.066.305.143	2.481.612.097	1.583.014.216	58.90	90.46	94.82	99.26	89.18	90.06		
PAD	629.994.520	698.488.972	818.420.400	830.811.840	538.829.472	- 4.000.000 - 2.000.000	558.836.020	603.548.480	705.414.397	724.719.840	670.613.089	- 128.804.272 - 2.007.220	88.70	86.40	86.12	87.23		- - 100		
BELANJA LANGSUNG	6,366,578,300.00	8,357,355,703.00	8,628,466,000.00	8,262,270,999.00	4,899,228,243.00	5,531,230,650.00	5,898,672,695.00	7,986,191,085.00	8,120,253,924.00	7,997,775,518.00	3,693,920,428.00	4,889,551,599.00	92.65	95.56	94.11	96.80	75.40	88.40	-1,89	-4,58
Program pelayanan administrasi perkantoran	446,561,500.00	470,186,400.00	482,813,000.00	454,193,000.00	450,751,000.00	485,901,300.00	391,404,445.00	439,396,652.00	447,203,890.00	436,623,035.00	366,448,062.00	417,278,064.00	87.65	93.45	92.62	96.13	81.30	85.88	2,17	1,61
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur	288,092,500.00	2,164,120,000.00	2,094,425,000.00	297,638,247.00	737,034,000.00	485,003,250.00	263,741,750.00	2,081,807,408.00	1,950,562,250.00	290,624,750.00	718,961,930.00	436,935,632.00	91.55	96.20	93.13	97.64	97.55	90.09	13,84	13,45
Program peningkatan disiplin aparatur	24,050,000.00	-	-	28,600,000.00	-	-	23,976,000.00	-	-	28,600,000.00	-	-	99.69	#DIV/0!	#DIV/0!	100.	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60,500,000.00	64,400,000.00	67,000,000.00	26,500,000.00	55,000,000.00	47,000,000.00	28,155,200.00	60,885,500.00	59,615,000.00	25,810,363.00	17,851,200.00	2,255,000.00	46.54	94.54	88.98	97.40	32.46	4.80	-6,32	-46,80
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	15,155,500.00	18,371,050.00	3,336,000.00	19,000,000.00	26,778,000.00	27,581,100.00	15,087,000.00	17,745,025.00	3,244,000.00	18,947,000.00	25,408,000.00	24,293,400.00	99.55	96.59	97.24	99.72	94.88	88.08	15,98	12,64
Program pemberdayaan ekonomi	70,398,750.00	372,516,250.00	323,100,000.00	868,792,000.00	901,095,000.00	250,000,000.00	25,530,000.00	289,031,250.00	307,043,000.00	840,100,950.00	833,466,368.00	192,785,000.00	36.26	77.59	95.03	96.70	92.49	77.11	37,26	65,76

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
masyarakat pesisir																				
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum	22,704,250.00	-	97,000,000.00	48,543,000.00	78,864,250.00	78,500,000.00	21,115,400.00	-	92,796,700.00	48,004,000.00	54,427,250.00	75,452,000.00	93.00	#DIV/0!	95.67	98.89	69.01	96.12	36,28	37,48
Program pengembangan perikanan tangkap	4,752,136,958.00	4,573,351,208.00	4,655,253,000.00	5,040,717,022.00	1,754,105,993.00	674,510,000.00	4,506,825,800.00	4,367,211,750.00	4,535,249,864.00	4,893,978,875.00	831,856,618.00	602,309,250.00	94.84	95.49	97.42	97.09	47.42	89.30	-38,83	-39,53
Program pengembangan budidaya perikanan	242,499,800.00	368,317,500.00	469,650,000.00	1,178,494,500.00	683,138,000.00	2,855,000,000.00	224,242,100.00	365,575,250.00	450,494,750.00	1,136,201,375.00	645,253,000.00	2,537,365,310.00	92.47	99.26	95.92	96.41	94.45	88.87	85,23	62,31
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	56,327,000.00	60,620,000.00	30,000,000.00	66,229,500.00	102,053,000.00	-	51,017,000.00	58,730,000.00	29,555,000.00	65,513,000.00	102,048,000.00	-	90.57	96.88	98.52	98.92	100	#DIV/0!	0	0
Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi	388,152,042.00	265,473,295.00	405,889,000.00	233,563,730.00	110,409,000.00	627,735,000.00	347,578,000.00	305,808,250.00	244,489,470.00	213,372,170.00	98,200,000.00	600,877,943.00	89.55	115.19	60.24	91.36	88.94	95.72	12,77	83,40

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar -1,89 persen dan realisasinya sebesar -4,58 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan pertumbuhan target sebesar 85,23 persen dan realisasinya sebesar 62,31 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (-6,32) persen dan realisasi sebesar (-46,80) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.6
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	Sasaran pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah produksi perikanan perikanan tangkap dalam 1 tahun a. Laut b. Perairan Umum	a. 9.336,25 (ton) b. 18,20(ton)	Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelutan dan Perikanan
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun a. Kolam b. Tambak	a. 101,318 (ton) b. 808,199 (ton)		
3.	Jumlah Produksi Garam	346,665.00 (ton)		

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Perikanan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1. Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hasil telaahan struktur ruang wilayah kabupaten Sampang, pada kinerja pelayanan Dinas Perikanan bisa dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.7
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana Jaringan Transportasi	Pengembangan Jalan Lingkar Selatan dan Srepang	Sesuai	Pengembangan wilayah pantai selatan dan pantai utara

Dari tabel 2.9 di atas menunjukkan bahwa rencana struktur ruang saat ini yaitu rencana jaringan transportasi. Sedangkan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan yaitu pengembangan jalan lingkar selatan dan Srepang. Sehingga pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan sesuai. Arahan lokasi pengembangan pelayanan yaitu pengembangan wilayah pantai selatan dan pantai utara.

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan

dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Hasil telaahan pola ruang wilayah kabupaten Sampang bisa dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.8
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Binaan Pelaku Usaha Perikanan	Binaan Pelaku Usaha Perikanan	Konservasi Mangrove, Cemara Udang dan Ekowisata Pantai	Prioritas program pengembangan produksi perikanan pada pelaku usaha perikanan (KUB PT, Poklhasar dan Pokmaswas)	14 Kecamatan di Kabupaten Sampang
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Air Payau	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan budidaya	Kecamatan Jrengik, Sreseh, Sampang, Camplong, Pangarengan dan Banyuates

3	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Air Tawar	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan budidaya	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang
4	Kawasan Perikanan Tangkap	Kawasan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan tangkap	Kecamatan Camplong, Sampang, pangarengan, Sreseh, Banyuates, Ketapang dan Sokobanah

Dari tabel 2.10 diatas menunjukkan bahwa rencana pola ruang dan pola ruang saat ini terdiri dari binaan pelaku usaha perikanan, kawasan terumbu karang, kawasan budidaya, kawasan perikanan tangkap. Untuk kawasan budidaya pola ruang saat ini dibagi menjadi dua yaitu kawasan budidaya air payau atau garam dan budidaya air tawar.

Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan, pengaruh rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dan arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang bisa dilihat pada tabel di atas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunann antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan periknsn Kabupaten sampn antara lain yaitu :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Perikanan	Belum optimalna mutu dan daya saing produk hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi olahan ikan belum seluruhna memiliki ijin usaha (PIRT/BPOM/halal) - Pelaku usaha pengolahan ikan belum seluruhnya memiliki SKP - Jaringan pemasaran belum terbentuk secara optimal

			<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikitnya pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang memiliki kapasitas ekspor
		Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap;	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan cuaca/iklim - Produksi perikanan budidaya juga dipengaruhi oleh kondisi alam dan cuaca/iklim - Produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan suatu produk pada usaha perikanan tangkap belum maksimal - Produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan suatu produk pada usaha perikanan budidaya belum maksimal
		Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelembagaan kelompok perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan lembaga atau kelompok perikanan yang belum kuat dan mandiri sehingga belum semuanya dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan
		Belum mantap dan mandiri kelembagaan usaha perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengajukan ijin usaha perikanan
		Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi usaha budidaya belum membentuk suatu kawasan yang terpadu - Lokasi usaha perikanan tangkap belum membentuk suatu kawasan yang terpadu

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Perikanan mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan yang dijabarkan pada Tabel 3.2 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.
Telaahan Visi, Misi Kepala Perangkat Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif Tujuan: Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Budidaya Perikanan dan pengembangan usaha Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Belum optimalnya pengembnagan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya b. Kompetensi SDM pelaku usaha perikanan yang belum merata/ memadai pada seluruh wilayah potensi perikanan di Kabupaten Sampang	a. Adanya potensi perikanan budidaya di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Sampang b. Adanya potensi perikanan tangkap laut pada 7 kecamatan pesisir di Kabupaten Sampang c. Adanya potensi perikanan tangkap laut perairan umum di wilayah kecamatan yang memiliki perairan umum
		Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap;	a. Kondisi alam, iklim atau cuaca yang tidak sesuai untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya b. Kemampuan untuk mengelola sumber daya perikanan yang belum memadai c. Pertumbuhan pelaku usaha perikanan dan tangkap belum signifikan d. Tingginya biaya operasional pada usaha budidaya perikanan	a. Adanya dukungan program pembangunan perikanan b. Adanya bantuan sarana prasarana usaha perikanan c. Adanya kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum optimalnya mutu dan daya saing produk hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;	a. Standar mutu penanganan dan pengolahan produk perikanan belum diterapkan secara optimal b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengajukan ijin usaha dan pengurusan SKP (Standar Kelayakan Pengolahan)	a. Adanya permintaan pasar akan produk perikanan b. Adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan c. Adanya kelembagaan atau kelompok bagi pengolah dan pemasar di Kabupaten Sampang
		Belum meratanya kualitas sumber daya manusia bidang perikanan;	a. Sebagian pelaku usaha perikanan adalah kelompok pemula yang belum memiliki kemampuan yang memadai	a. Adanya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perikanan b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan yang akan mendukung peningkatan kualitas SDM perikanan
		Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelembagaan kelompok perikanan	Kelompok perikanan belum semuanya dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan dikarenakan keterbatasan kepemilikan jaminan	Adanya kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi kelompok perikanan baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah atau pemasar ikan
		Belum mantap dan mandiriya kelembagaan usaha perikanan.	Sebagian besar kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula	Adanya kegiatan pendampingan kelembagaan bagi kelompok perikanan

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung visi presiden dan wakil presiden sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah dengan menjabarkan visi tersebut menjadi “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan (KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP;
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Dari tujuan tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis pada 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

a. *Stakeholder Perspective*

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

b. *Customer Perspective*

2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;

c. *Internal Process Perspective*

4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola SDKP bertanggung jawab;
7. Industrialisasi KP berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;

d. *Learn and Growth Perspective*

9. Tatakelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendukung tujuan ke-2 dari Renstra KKP yaitu Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional dan sasaran ke-7 yaitu Industrialisasi KP berdaya saing, dimana indikator dari sasaran ini adalah jumlah produksi perikanan. Selain itu tentunya mendukung sasaran ke-9 yaitu tatakelola pemerintahan yang baik.

b. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Selaras dengan kebijakan nasional, maka visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.” Adapun misi Provinsi Jawa Timur yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yaitu:

- | | |
|-----------|---|
| Misi ke-1 | :Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah |
| Tujuan | :Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah |
| Sasaran | :Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagai pelaksana urusan bidang kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota mendukung tujuan dan sasaran yang sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tersebut di atas.

c. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menjabarkan misi tersebut dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2020 melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran tersebut diwujudkan melalui program-program pendukung Nawa Bhakti Satya “Jatim Agro” sebagai berikut:

1. Pemenuhan bahan baku ikan;
2. Pemenuhan bahan baku industri garam;
3. Penguatan logistik dan distribusi;
4. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
5. Penyempurnaan pelabuhan perikanan;
6. Asuransi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya;
7. Menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan;
8. Pengawasan perairan terpadu;
9. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K);
10. Rehabilitasi mangrove/vegetasi pantai dan terumbu karang buatan.

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagai pelaksana urusan kelautan dan perikanan pada tingkat kabupaten mendukung arah kebijakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang pertama yaitu: “Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat”. Selaras dengan dukungan pada agenda pembangunan pemerintah pusat, misi provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah pada misi yang pertama yaitu “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan

Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah” dengan sasaran Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lebih lanjut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menjabarkan misi dan sasaran tersebut salah satunya dengan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan. Hal ini pula yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang pada urusan kelautan dan perikanan yaitu dengan hendak meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan, pencapaian visi dan misi kepala daerah, dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan, kebijakan pengarusutamaan gender, dan pengembangan pemanfaatan potensi bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran ikan menjadi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada sub bab 3.1 dan dikaitkan dengan telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pada pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Permasalahan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>KKP: Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional</p> <p><i>Provinsi Jawa Timur:</i> Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</p> <p><i>DKP Prov Jatim:</i> Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan</p>	Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelembagaan kelompok perikanan	Kelompok perikanan belum semuanya dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan dikarenakan keterbatasan kepemilikan jaminan	Adanya kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi kelompok perikanan baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah atau pemasar ikan
		Belum mantap dan mandiri	Sebagian besar kelas kelompok perikanan	Adanya kegiatan pendampingan

		kelembagaan usaha perikanan.	merupakan kelas kelompok pemula	kelembagaan bagi kelompok perikanan
		Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya b. Kompetensi SDM pelaku usaha perikanan yang belum merata/ memadai pada seluruh wilayah potensi perikanan di Kabupaten Sampang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya potensi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Sampang b. Adanya program pengembangan kawasan dari KKP dan Provinsi Jawa Timur
		Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap;	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi alam, iklim atau cuaca yang tidak sesuai untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya b. Kemampuan untuk mengelola sumber daya perikanan yang belum memadai c. Pertumbuhan pelaku usaha perikanan dan tangkap belum signifikan d. Tingginya biaya operasional pada usaha budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dukungan program pembangunan perikanan b. Adanya bantuan sarana prasarana usaha perikanan c. Adanya kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya
		Belum optimalnya mutu dan daya saing produk hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar mutu penanganan dan pengolahan produk perikanan belum diterapkan secara optimal b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengajukan ijin usaha dan pengurusan SKP (Standar Kelayakan Pengolahan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya permintaan pasar akan produk perikanan b. Adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan c. Adanya kelembagaan atau kelompok bagi pengolah dan pemasar di Kabupaten Sampang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sampang tahun 2019-2024 Beberapa hal yang ditelaah dalam RTRW adalah :

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sampang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut:

- a. Perikanan darat antara lain adalah: Usaha budidaya ikan berupa ikan kolam, karamba dan kolam pembenihan ikan (KPI) yang terdapat di Kecamatan Pengarengan.
- b. Perikanan laut, terdapat di Kecamatan Sampang, Camplong, Sreseh, Pengarengan, Ketapang, Banyuates dan Sokobanah antara lain adalah: usaha penangkapan ikan di laut, usaha penangkapan ikan dan restocking di perairan umum, usaha perikanan di bidang pasca panen yaitu pengolahan ikan.

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan

keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Isu strategis yang ada, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan. Keberadaan sawah terutama sawah yang terlayani irigasi teknis terancam oleh pesatnya pembangunan permukiman, industri dan jasa.

Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya. Ditinjau dari implikasi KLHS, program-dan kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada sub bab 3.1 dan dikaitkan dengan telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Sampang, selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pada pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RTRW dan KLHS	Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan usaha perikanan b. Kompetensi SDM pelaku usaha perikanan yang belum memadai	a. Adanya potensi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Sampang b. Adanya penetapan kawasan budidaya perikanan
		Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap;	Masih adanya praktek usaha perikanan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan	a. Kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

				b. Adanya program pengawasan sumberdaya perikanan yang mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan
--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, RTRW Kabupaten Sampang, KLHS Kabupaten Sampang dan hasil analisa isu-isu strategis pada permasalahan pembangunan perikanan di Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, maka dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah:

1. Produksi perikanan tangkap dari laut dan perairan umum, maupun perikanan budidaya di kolam dan tambak masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Produksi dan kualitas garam perlu ditingkatkan
3. Pertumbuhan sektor perikanan belum maksimal

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran P-RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada P-RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang, Tahun 2019-2024 seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi ke - 2 Bupati Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif”**, sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun penjabaran atas tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET (%) KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan:									
	Meningkatnya Pendapatan sektor perikanan	1. Nilai Tukar/Nelayan/Pembudidaya/P etambak Garam/Pengolah Hasil Perikanan a. NTN b. NTPi c. NTPG d. NTPHP	n/a n/a n/a n/a	101,9 101 113 n/a	102,4 103 115 n/a	103 105 117 n/a	102 104 100 100	102 104 100 100	102 104 100 100	102 104 100 100
	Sasaran:									
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Garam a. Budidaya b. Garam	22,05 103,24	3,93 -99,92	2,5 2,91	2,6 2,83	2,72 3,00	2,72 3,00	2,8 3,09	2,8 3,09
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap a. Laut b. PUD	34,03 -13,99	5,68 15,38	1,50 2,38	2,11 2,33	2,90 3,00	2,79 3,3	2,79 3,5	2,79 3,5
	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka konsumsi ikan kg/kapita /tahun	n/a	27,6	27,6	32,89	33,5	40	41,5	41,5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang 2022

Berdasarkan tabel (4.1) di atas, Tujuan pembangunan perikanan Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 adalah Meningkatkan pendapatan sektor perikanan, untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu dengan cara menentukan strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan perikanan serta tolak ukur pencapaiannya. Penetapan indicator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama mengalami perubahan berdasarkan penajaman hasil evaluasi SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam	Peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam diperoleh dari produksi tahun lalu (n-1) dikurangi dengan produksi tahun n dibagi tahun (n-1) $f(x) = \frac{b - a}{b}$ Ket: a = produksi tahun ke n b = produksi tahun ke n-1	Bidang Periknan Budidaya	Kepala Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap diperoleh dari produksi tahun lalu (n-1) dikurangi dengan produksi tahun n dibagi tahun (n-1) $f(x) = \frac{b - a}{b}$ Ket: a = produksi tahun ke n b = produksi tahun ke n-1	Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka konsumsi ikan kg/kapita/th	Konsumsi ikan = ketersediaan ikan/jumlah penduduk Ketersediaan ikan = (produksi tangkap + produksi budidaya + impor) - (Ekspor + jumlah stok) - (produksi ikan non pangan)	Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	Kepala Dinas Perikanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sehubungan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya perikanan serta terjadinya penurunan produktivitas akibat rendahnya daya dukung lingkungan, maka dibutuhkan manajemen pembangunan perikanan yang baik dan berkelanjutan. Disamping itu juga dengan adanya permasalahan di lapangan yang semakin kompleks dan bersifat multi dimensial, perlu perencanaan yang matang dan komprehensif agar misi-misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Pembangunan di bidang perikanan harus bisa memanfaatkan peluang-peluang serta potensi yang ada dan lebih menitikberatkan keberpihakan kepada nelayan/pembudidaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan perlu menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan strategis.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan

Dinas Perikanan haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan sector unggulan dan ekonomi kreatif”.

Tabel 5.1
Strategi dan arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 2						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT. 3 IT.4 IT.5	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indeks Gini	Meningkatkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sumberdaya manusia perikanan• Pengembangan kawasan budidaya perikanan• Pengembangan pengolahan produk hasil perikanan	Dinas Perikanan
S.11	Meningkatnya pengelolaan sector unggulan dan ekonomi kreatif	IS.13	% pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan, perikanan			

Untuk mendukung pelaksanaan strategi strategi di atas, perlu dirumuskan kebijakan. Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan program kegiatan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang bersumber kepada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan kementerian teknis, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan pemerintah Kabupaten Sampang serta kebijakan internal Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

VISI : Sampang Hebat Bermartabat			
MISI 2 : Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pendapatan sector perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Pengupayaan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pembudidaya ikan dan nelayan melalui pelatihan, pembinaan, percontohan dan inovasi (pembelajaran) 2. Pengoptimalan pemenuhan sarana dan prasarana budidaya ikan dan penangkapan melalui pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan dan penangkapan 3. Peningkatan kualitas Kelembagaan Kelompok Perikanan (tangkap dan budidaya) 4. Optimalisasi fungsi TPI sebagai Tempat Pelelangan Ikan

VISI : Sampang Hebat Bermartabat			
MISI 2 : Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan produksi garam rakyat serta peningkatan pendapatan petambak garam	1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pengetahuan petambak garam 2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan kelompok perikanan 3. Melakukan pemanfaatan kawasan dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya
	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan untuk meningkatkan pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan	1. Pelaksanaan program gemar makan ikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak-anak 2. Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan ikan dan keanekaragaman produk olahan ikan 3. Pengadaan sarana dan prasarana pasca panen dan akses permodalan serta pemasaran. 4. Menyelenggarakan pembinaan terkait legalisasi kelompok

Berdasarkan arah kebijakan yang tertian dalam table diatas, pengembangan inovasi Dinas Perikanan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1.	Bu Mei Sisblow (Budidaya Vannamei Sisem Blower)	<p>Permasalahan:</p> <p>Semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 150 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tanggal 30 Desember 2022, tingkat keberhasilan pembangunan Pengembangan Kawasan Agropolitan belum dapat diukur. Berbagai program pembangunan ekonomi berbasis perikanan, khususnya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan telah dilaksanakan. PPL dan PPB telah berupaya mensinergikan berbagai potensi yang ada, menuju pada upaya yang utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi agar bisa sinergi digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah (Departemen PU, 2007). Kendala yang dihadapi tetap saja belum bisa menggali potensi dan keinginan masyarakat, khususnya di lokasi Kawasan Agropolitan.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 2. Percepatan pengembangan wilayah 3. Mendorong adanya sistem dan usaha agribisnis 4. Mengurangi kesenjangan antar wilayah <p>Manfaat:</p> <p>Dengan Menggunakan Sistem Blower Pelaku Usaha/Pelaku Utama Budidaya Perikanan bisa lebih menghemat biaya pembelian kincir pada saat kegiatan budidaya vannamei, akan tetapi dengan sistem blower dapat memberikan income yang maksimal terhadap pelaku usaha/pelaku utama. Kedepan nya inovasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha/pelaku utama di daerah/kawasan lainya</p> <p>Hasil Inovasi:</p> <p>Dengan adanya inovasi ini, semakin berkembangnya kawasan yang didampingi baik secara pendapatan maupun munculnya inovasi budidaya vannamei yang awalnya hanya memakai system semi intensif.</p>
2.	Pempek Bang Dedeng (Pendampingan Pengolah Ikan Bandeng D'kampoenng Bandeng)	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa apa'an kec. Pangarengan merupakan daerah penghasil garam, dengan luas tambak 672.017 ha, dengan petani tambak sebanyak 62 kelompok (data dinas perikanan). 2. Pada saat musim hujan lahan garam tidak dimanfaatkan dan menjadi lahan tidur. Namun beberapa petambak memanfaatkan lahannya untuk membudidaya bandeng dengan sistem monokultur dengan sistem pemeliharaan secara tradisional. 3. Air untuk tambak diambil dari laut, yang diketahui lautnya masih bagus karena tidak ada limbah pabrik sehingga mutu bandeng sangat baik dan rasanya lebih gurih dibandingkan

		<p>daerah lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tambak bandeng juga terdapat di daerah jrengik, desa majengan dusun lobuk dan desa asem nonggal dan asem rajeh. 5. Poklaksar paggun nyaman dibentuk tahun 2019. Meski masih baru namun semangatnya sangat tinggi. <p>Tujuan :</p> <p>Tujuannya untuk menciptakan suatu kawasan olahan ikan bandeng sebagai penunjang kawasan perikanan budidaya d'kampong bandeng, yang berkelanjutan demi menciptakan keluarga yang sehat disebut "pempek bang dedeng (pendampingan pengolah ikan bandeng d'kampong bandeng)"</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjadi sentra usaha bandeng yang berdaya saing mulai dari hulu sampai hilir 2. Sebagai mata pencaharian masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup 3. Peningkatan gizi masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh 4. Penunjang kawasan pariwisata di kampoeng belanda <p>Hasil Inovasi:</p> <p>Terciptanya suatu perkampungan budidaya. Dan olahan pangan "bandeng" yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan tersebut akan berkembang menjadi kawasan kampung pariwisata dan kawasan oleh-oleh khas sampang yang akan menunjang wisata di wilayah tersebut</p>
3.	Laju Si Dewan Ok (Laola Juko' Siongan De' Kawasan Olahan Ikan)	<p>Permasalahan:</p> <p>Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang banyak pembudidaya lele, produksi sekabupaten sampang adalah 123.050 ton, sedangkan di kecamatan sampang sebesar 11.085 ton yang tersebar di beberapa desa. penjualan bisa secara langsung ke masyarakat atau online. Ada juga yang dijual dalam bentuk olahannya. Kecamatan Sokobanah terletak di bagian utara Kabupaten Sampang. merupakan salah satu daerah potensi untuk produksi perikanan, mempunyai laut dengan pemandangan yang indah, yang ditetapkan sebagai desa wisata. sebagian besar penduduknya sebagai nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. ikan diolah menjadi terasi, petis, atau dijual dalam bentuk kering. Dari hasil binaan penyuluh perikanan tercatat data bahwa produksi ikan lele di Kecamatan Sokobanah tahun 2021 sebesar 25.620 kg (data Dinas Perikanan). Memperhatikan besarnya potensi ikan lele di sekitar Desa Bira dan kurangnya variasi olahan juko' siongan (lele) maka Dinas Perikanan mengadakan pelatihan pengolahan ikan siongan agar memajukan Desa Wisata Bira Tengah. Usaha mengolah lele telah membantu penghasilan keluarga dan menjaga stabilitas ketahanan pangan keluarga, diversifikasi olahan ikan dari segi gizi hewani. lele mengandung gizi yang tinggi kaya akan protein, vitamin, mineral dan asam lemak omega. Mengonsumsi ikan lele (siongan) akan</p>

		<p>memiliki imunitas yang baik sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, sebagaimana pada slogan gemar makan ikan "sehat kuat dan cerdas"</p> <p>Tujuan</p> <p>Tujuannya untuk menciptakan suatu kawasan olahan lele sebagai penunjang kawasan wisata desa, kawasan perikanan budidaya siongan, yang berkelanjutan demi menciptakan keluarga yang sehat disebut "laju si dewan oka (laola juko' siongan de' kawasan olahan ikan)"</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjadi kawasan desa wisata yang menyediakan variasi menu makanan yang bergizi dan sehat. 2. Sentra usaha lele yang berdaya saing mulai dari hulu sampai hilir 3. Sebagai mata pencaharian masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup 4. Peningkatan gizi masyarakat untuk memperkuat imunitas dalam menghadapi serangan penyakit 5. Sumber protein yang berkualitas yang murah <p>Hasil inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya suatu kawasan wisata yang menunya bergizi dan variatif 2. Menciptakan kawasan budidaya dan olahan ikan "siongan" atau lele yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga 3. Masyarakat sekitarnya. Kawasan tersebut akan berkembang menjadi kawasan kampung siongan (lele) yang menunjang wisata di wilayah tersebut.
4.	Mon Ngankes Ikan (Monitoring Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan)	<p>Permasalahan:</p> <p>Monitoring Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha budidaya ikan. Pembudidaya ikan disarankan untuk selalu melakukan monitoring terhadap kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan secara periodik sehingga penyebaran penyakit serta penurunan kualitas kesehatan dan lingkungan budidaya ikan segera dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kerugian pada pelaku usaha budidaya ikan. Akan tetapi tidak setiap pembudidaya ikan mempunyai alat untuk mengukur setiap parameter kualitas kesehatan dan lingkungan pada usaha budidayanya, karena hal ini memerlukan biaya yang cukup banyak, atas pertimbangan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sampang melakukan kegiatan monitoring lingkungan budidaya dan kesehatan ikan dengan mendatangi ke tempat-tempat usaha pembudidayaan ikan, sehingga dari sini pembudidaya ikan tidak usah mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli sendiri beberapa alat pengukuran uji kualitas kesehatan ikan, mereka cukup memberi laporan kepada Dinas Perikanan tentang kondisi usaha budidayanya dan meminta untuk dilakukan pengecekan atau monitoring.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membantu pembudidaya melakukan pengecekan

		<p>kualitas lingkungan budidaya dan kesehatan ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dapat mengendalikan serangan penyakit ikan 3. Mencegah terjadinya kematian mendadak pada ikan yang myebabkan kerugian dalam usaha budidaya ikan 4. Mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan. <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menurunkan angka kematiaan dalam budidaya ikan 2. Dapat meningkat angka produksi budidaya ikan 3. Dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan <p>Hasil Inovasi :</p> <p>Pemanfaatan monitoring ini dilakukan di kelompok usaha pembudidaya ikan di kabupaten Sampang</p>
5.	Dioka Wanel (Diversifikasi Olahan Ikan Bagi Wanita Nelayan)	<p>Permasalahan:</p> <p>Pekerjaan sebagai nelayan berupa melaut/menangkap ikan penghasilannya tidak menentu. Pekerja tersebut dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca dan musim. Saat musim paceklik hasil tangkapan ikan, musim teraan dan cuaca tidak menentu nelayan tidak mempunyai penghasilan. Adanya gesekan antar nelayan yang bisa mengarah konflik antar nelayan yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan. Ketergantungan nelayan hanya pada usaha melaut perlu dirubah dan perlu ada solusinya. Solusi tersebut perlu adanya alternatif usaha berupa Inovasi DIOKA WANEL (Diversifikasi Olahan Ikan Bagi Wanita Nelayan). Sehingga dengan inovasi tersebut dapat menambah pendapatan bagi nelayan dan keluarganya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan juga bisa meningkat.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan beserta keluarganya. 2. Sebagai usaha alternatif yang selama ini nelayan hanya bergantung pada usaha melaut/menangkap ikan saja yang dipengaruhi oleh faktor alam dan musim. 3. Lebih memberdayakan wanita nelayan yang sebagian besar selama ini tidak ada aktifitas dirumahnya, hanya menunggu hasil tangkapan ikan oleh suami. <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa meningkatkan pendapatan nelayan beserta keluarganya di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, Di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan dan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang yang menyebabkan kesejahteraannya meningkat. 2. Bisa sebagai usaha alternatif yang membantu nelayan tidak hanya mengandalkan usaha melaut saja yang dipengaruhi faktor alam dan musim terutama saat musim sepi hasil tangkapan ikan atau musim paceklik, 3. Bisa memberdayakan wanita nelayan agar tidak hanya diam dirumah menunggu suaminya pulang dari melaut, tetapi lebih produktif melalui inovasi Dioka Wanel (Diversifikasi Usaha

		<p>Bagi Wanita Nelayan) di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, Di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan dan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang.</p> <p>Hasil Inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan wanita nelayan yang lebih produktif melalui inovasi Dioka Wanel di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, Di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan dan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang. 2. Wanita nelayan di ketiga Kecamatan tersebut mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengolah ikan agar mempunyai nilai tambah yang selama ini hanya dijual dalam keadaan segar.
6.	<p>Kampung Nelayan Berseri (Bersama Mengelola Sumberdaya Ikan yang Lestari)</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Permasalahan “tragedy of the open access” terjadi karena ada faktor pendukung, diantaranya adalah nelayan salah mengartikan sumber daya ikan sebagai renewable resource, para pelaku kegiatan perikanan tangkap terus memaksimalkan hasil tangkap demi keuntungan pribadi, dan para pelaku kegiatan perikanan tangkap belum memahami prinsip pengelolaan sumberdaya ikan yang lestari dan berkelanjutan Masalah lain dalam perkembangan perikanan tangkap di Indonesia yaitu angka pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang terjadi masih terbilang cukup tinggi. Kerugian yang dirasakan akibat IUU Fishing selain pada sektor ekonomi, dapat menimbulkan permasalahan dalam pendugaan stok ikan, kemudian yang paling krusial yaitu timbulnya konflik sosial antar nelayan dalam memperebutkan daerah hasil tangkapan baik sesama nelayan dengan alat tangkap yang sama atau berbeda. Merosotnya angka potensi subsector perikanan tangkap membuat pemerintah mengalihkan fokus masyarakat untuk mulai mengelola subsector perikanan.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. 2. Mendorong Kesadaran masyarakat terhadap upaya – upaya pelestarian sumberdaya ikan. <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi potensi Konflik nelayan. 2. Mempertahankan potensi lestari sumberdaya perikanan. <p>Hasil Inovasi :</p> <p>Dengan adanya inovasi ini akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha penangkapan ikan dan peningkatan pendapatan nelayan.</p>
7	<p>MBAK MIA (Lomba Kelompok Pembudidaya</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan sangat penting

	Ikan)	<p>untuk mewadahi kegiatan usaha perikanan budidaya, sehingga memerlukan kelembagaan yang kuat dan settle.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang bagus akan mempengaruhi eksistensi keberlanjutan usaha perikanan budidaya. 3. Motivasi pembudidaya harus ditumbuhkan melalui ajang kompetisi lomba kelompok pembudidaya ikan <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan ruang kompetisi eksistensi keberlanjutan kelompok pembudidaya ikan serta keberlanjutan usaha budidaya 2. Untuk memberikan apresiasi kepada pelaku usaha budidaya ikan dalam wadah kelompok pembudidaya ikan yang sudah berkembang dan mandiri. <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memberikan ruang kompetisi eksistensi keberlanjutan kelompok pembudidaya ikan serta keberlanjutan usaha budidaya. 2. Dapat memberikan semangat kepada pelaku usaha budidaya ikan dalam wadah kelompok pembudidaya ikan yang sudah berkembang dan mandiri. <p>Hasil Inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan melalui ajang kompetisi lomba kelompok pembudidaya ikan 2. Lomba kelompok pembudidaya ikan memberikan semangat untuk mengembangkan kelompok dan usaha budidaya perikanan. 3. Lomba kelompok pembudidaya ikan dapat menumbuhkan produktifitas usaha dan meningkatkan produksi perikanan budidaya.
--	-------	---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam matrik Rencana, Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra ini.

Dalam merancang program dan kegiatan selama tahun 2019-2024, Dinas Perikanan merencanakan 4 program dan 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Tentunya program dan kegiatan ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran yang telah mengacu pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan renja Dinas Perikanan. Hal ini dilaksanakan demi menjamin konsistensi dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian visi-misi Dinas Perikanan sebagai satuan unit SKPD dan visi-misi Kepala Daerah terpilih dapat tercapai.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024																						
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRA M /KEGIAT AN/ SUB KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJ A	LOK ASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
TUJUAN/SASAR AN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
Meningkatkan Pertumbuhan sub Sektor Perikanan				Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	5,26	5.36		5.46												Dinas Perik anan	
				Nilai Tukar Nelayan/Pem budidaya/Pet ambak Garam																		
				a. NTN		n/a	101,9		100,1													
				b. NTPi		n/a	101		104													
				c. NTPG		n/a	50		50													

	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam		100																	
				a. Budidaya	%	22.05	-14,90		25														
				b. Garam	%	103,24	-11,23		-43.26														
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap																			
				a. Laut	%	34.03	51.38		7,20		2.5		2.6		2.7		2.8						
				b. PUD	%	-13.99	13.3		-34.6		2.3		4		6		8						
				Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	%	n/a																	

		3.01.3.0 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	##### ###	100	##### #												
		3.01.3.0 1.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	1.434	1849	##### ###	1945	##### ##												
				cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12													
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	53	34		45													

[illegible]

		3.01.3.0 1.01.01. 02	Penyediaa n Sarana Administ rasi Perkantor an	Jumlah ATK	jenis	48	33	##### ###	35	##### ##												
				Jumlah barang cetakan	jenis	6	6		6													
				Jumlah barang penggandaan	lemb ar	4370	3900		5000													
				Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	35	16		16													
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	maca m	2	2		2													
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	kotak	480, 220	480, 220		480, 220													

				jumlah belanja modal kipas angin, jumlah rounter, jumlah antena wifi	buah	0	3, 1,		0													
		3.01.3.0 1.01.01. 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	bulan	12	12	##### ###	12	##### ##												
				Jumlah koordinasi luar daerah	bulan	12	12		12													
		3.01.3.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	##### ##	100	##### ##												

		3.01.3.0 1.01.02. 01.	Pembangu nan/Reha b/ Pemeliha ran Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	gedu ng	1	1	21,425, 500	1	##### ##												
		3.01.3.0 1.01.02. 03.	Pengadaa n/Pemeli haraan Kendaraa n Dinas Operasion al	Jumlah kendaraan dinas/operasio nal dan pemeliharaann ya	unit	3	3	65,434, 368	3	##### ##												
		3.01.3.0 1.01.02. 04.	Pengadaa n/Pemeli haraan Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	paket	1	1	##### ###	1	##### ##												
				Jumlah pengadaan alat pendingin,	unit	0	4		0													

				Jumlah komputer yang diadakan	unit	2	2		3													
				Jumlah printer yang diadakan	unit	3	3		3													
				Jumlah meubelair yang diadakan	paket	0	1		2													
				Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	30	0		0													
				jumlah pengadaan peralatan studio visual,	unit	0	1		0													
				jumlah pengadaan alat telepon fax	unit	0	1		0													

		3.01.3.0 1.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	0	-	0	-												
		3.01.3.0 1.01.03. 01.	Pelaksanaan BinteK/So sialisasi/S eminar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN	1	0	-	0	-												
		3.01.3.0 1.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	100	##### ###	100	-												

		3.01.3.0 1.01.04. 01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dok	3	3	13,052, 500	3	-												
				Jumlah laporan keuangan semesteran	dok	2	2		2													
				Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	dok	1	1		1													
				Jumlah penyusunan SAKIP dan Lakip	dok	2	2		2													
		3.01.3.0 1.01.04. 02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	4	4	12,580, 000	3	-												

		3.01.3.0 1.01.04. 03.	Peningkat an Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	dok	0	1	12,500, 000	1	-												
				Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	1	2		0													
		3.01.3.0 1.01.15.	Program Pengemb angan Perikana n Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Laut: ton	9336.25	14133. 5	##### ###	15151. 5	##### ##												
					PUD: ton	18.2	20.7		15.6													
		3.01.3.0 1.01.15. 01.	Pengeloaa n Sumberda ya Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang dibina,	orang	280	280	##### ###	105	##### ##												
				Jumlah pokmaswas yang dibina	kelo mpok	3	3		3													

				cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui bintek teknologi tepat guna pengelolaan sumberdaya perikanan,	kelompok	0	140		3													
				Jumlah restocking benih ikan air tawar,	lokasi	0	2		4													
				Jumlah sosialisasi gemarikan pada sekolah TK	desa	0	350		0													

				Jumlah pertemuan statistik P4 & update data perikanan	orang		40		0	-												
				Jumlah update data P4 dan kapal perikanan	Petugas		25		0	-												
		3.01.3.0 1.01.16.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	800	909.51	##### ###	1050.2 3	##### ##												
				Jumlah Produksi Garam Rakyat	ribu ton	260	307714		174.59 8													

		3.01.3.0 1.01.16. 01.	Peningkat an Sumberda ya Perikanan Budidaya dan Garam	pengadaan benih lele , nener bandeng, benih udang pakandan obat-obatan serta terlaksana penyerahan barang pada kelompok pembudidaya ikan	kelo mpok	32	20	##### ###	0	##### ##													
				Jumlah pokdakan/pela ku usaha budidaya perikanan yang difasilitasi untuk pengembangan budidaya	kelo mpok	0	0		4														

		3.01.3.0 1.01.16. 02.	Peningkat an Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Garam ;	Pengadaan jembatan produksi	paket	0	1	##### ###	2	##### ##												
				Demplot percontohan budidaya ikan nila di air payau	demp lot	0	0		30													
				pembinaan demonstator percontohan budidaya ikan nila	pemb udida ya ikan	0	0		30													
				Normalisasi saluran tambak	paket		3		0													
				Pencatatan usaha pembudidaya ikan	kelo mpok		20		0													

				Data perencanaan pembangunan BBI	dok		1		0													
		3.01.3.0 1.01.16. 03.	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah sosialisasi dan pengambilan sampel di lingkungan budidaya perikanan	Kecamatan		14	88,316,000	14	#####												
			Program Pengembangan Usaha dan Data Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah	%	2.63	n/a	-	36.85	#####												
				Konsumsi ikan perkapita	kg/kapita/tahun	26.82	n/a	-	31.58													

			Kegiatan Peningkatan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah UPI yang mendapat pembinaan CPIB dan penanganan produk halal	orang	0	0	-	75	##### ##												
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pembinaan akses pasar dan permodalan	orang	0	0	-	75													
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Promosi Perikanan	Data statistik dan informasi perikanan	bulan	0	0	-	12	##### ##												
				Promosi produk perikanan melalui Gemarikan	desa	0	0	-	4													
				Pameran	kali	0	0	-	0													

				Festifal Joko' Tase'	kali	0	0	-	0													
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																						
Meningkatnya pendapatan sektor perikanan				Nilai Tukar Nelayan (NTN)							100		100		100		100		100			
				Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)							100		100		100		100		100			
				Nilai Tukar Petambak Garam							100		100		100		100		100			
				Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan							100		100		100		100		100			
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap																		
				a. Laut	%						2.5		2.6		2.7		2.8		2.8			
				b. PUD	%						2,3		4		6		8		8			

	Meningkatnya produksi perikanan budidaya			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya																		
				a. Budidaya	%																	
				b. Garam	%																	
	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat			Angka konsumsi ikan	kg/kapita/th					32.89		33.5		34.4		35.5		35.5				
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%					100	3,72 0,74 6,33 1.00	100	3,61 5,72 1,20 8.00	100	3,64 6,44 7,50 7.00	100	3,64 9,00 4,10 7.00	100	#### #### #### #			
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	%					100	24,7 17,4 82.0 0	100	24,0 36,1 57.0 0	100	24,0 36,1 57.0 0	100	24,0 36,1 57.0 0	100	96,8 25,9 53.0 0			

		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, SOP, KAK)	dok						4	2,987,594.00	4	3,667,594.00	4	3,667,594.00	4	3,667,594.00	16	13,990,376.00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen						4		4		4		4		16			
		3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dok						1	2,955,605.00	1	3,835,605.00	1	3,835,605.00	1	3,835,605.00	4	14,462,420.00		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok						1	2,977,089.00	1	3,514,589.00	1	3,514,589.00	1	3,514,589.00	4	13,520,856.00		

				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	dok						1	2,885,940.00	1	4,455,940.00	1	4,455,940.00	1	4,455,940.00	4	16,253,760.00		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok						1	2,957,678.00	1	3,760,178.00	1	3,760,178.00	1	3,760,178.00	4	14,238,212.00		

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	dok						5	9,953,576.00	5	4,802,251.00	5	4,802,251.00	5	4,802,251.00	20	24,360,329.00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan						5		5		5		5		20			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%						100	2,636,065,909.00	100	2,774,918,452.00	100	2,774,918,452.00	100	2,774,918,452.00	100	#### #### #### #		

		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TTP ASN	Bulan						25	2,594,223,325.00	25	2,768,047,976.00	25	2,768,047,976.00	25	2,768,047,976.00	25	10,898,367,253.00		
				Jumlah penyediaan jasa tenaga honor daerah	orang						1		1		1		1		1			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang /bulan						25		24		24		24		97			
		3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan alat-alat tulis kantor	jenis						35	32,852,108.00	0	0	0	0	0	0	0	32,852,108.00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	dok						1	2,998,194.00	1	2,398,194.00	1	2,398,194.00	1	2,398,194.00	4	10,192,776.00		

				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	dok						1	2,997,594.00	1	2,197,594.00	1	2,197,594.00	1	2,197,594.00	4	9,590,376.00		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dok						3	2,994,688.00	3	2,274,688.00	3	2,274,688.00	3	2,274,688.00	12	9,818,752.00		

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan						3		3		3		3		12			
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	%						100	248,879,417.00	100	196,439,538.00	100	196,439,538.00	100	196,439,538.00	100	838,198,031.00		
		3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti seminar/bimtek/sosialisasi	orang						0	0	1	29,025,000.00	1	29,025,000.00	1	29,025,000.00	3	87,075,000.00		

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1		1		1		1		4				
		3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang					425	248,879,417.00	250	167,414,538.00	250	167,414,538.00	250	167,414,538.00	1175	751,123,031.00			
				Jumlah sosialisasi tatap muka	frekuensi					9		6		6		6		27				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					425		425		425		425		1700				
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%					100	285,157,763.00	100	263,162,546.00	100	265,489,960.00	100	266,309,960.00	100	1,080,120,229.00			

		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	unit						18	13,272,466.00	15	10,461,538.00	15	10,500,000.00	15	11,000,000.00	63	45,234,004.00		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis						38	64,035,677.00	18	41,828,211.00	18	41,900,000.00	18	42,000,000.00	92	189,763,888.00		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	unit						0	0	42	28,414,473.00	42	28,500,000.00	42	28,520,000.00	126	85,434,473.00		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						1		1		1		1		4			

		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis					6	21,099,500.00	5	18,288,364.00	6	18,500,000.00	6	18,700,000.00	23	76,587,864.00		
				Jumlah belanja pengadaan yang disediakan	lembar					40000		40000		40000		40000		160000			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1		1		1		1		4			
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	jenis					1	1,800,000.00	2	2,280,000.00	2	2,280,000.00	2	2,280,000.00	7	8,640,000.00		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2		2		2		2		8			

		3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kunjungan tamu	orang						300	12,000,000.00	300	10,080,000.00	300	12,000,000.00	300	12,000,000.00	300	46,080,000.00		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan						12	172,950,120.00	12	151,809,960.00	12	151,809,960.00	12	151,809,960.00	48	628,380,000.00		
				Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan						12		12		12		12		48			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat	orang						696		696		696		696		2784			

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%						100	28,530,300.00	100	37,940,750.00	100	38,063,400.00	100	38,300,000.00	100	142,834,475.00		
		3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	jenis						0	0	2	9,563,400.00	2	9,563,400.00	2	9,800,000.00	6	28,926,800.00		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit						2		2		2		2		8			
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit						2	28,530,300.00	3	28,377,375.00	3	28,500,000.00	3	28,500,000.00	11	113,907,675.00		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit						3		3		3		3		12			

		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%						100	209,298,978.00	100	175,973,740.00	100	177,000,000.00	100	178,000,000.00	100	733,274,608.00		
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat						1890	8,360,881.00	1890	5,690,740.00	1890	6,500,000.00	1890	7,000,000.00	#### ###	20,553,511.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	bulan						12	74,234,097.00	12	78,483,000.00	12	78,500,000.00	12	79,000,000.00	12	310,217,097.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						12		12		12		12		48			

		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan						12	126,704,000.00	12	91,800,000.00	12	92,000,000.00	12	92,000,000.00	12	402,504,000.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						12		12		12		12		48			
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	%						100	288,096,482.00	100	143,250,000.00	100	151,000,000.00	100	151,000,000.00	100	733,346,482.00		
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit						2	44,300,000.00	2	49,750,000.00	2	48,000,000.00	2	48,000,000.00	2	190,050,000.00		

				Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit						38		47		47		47		47			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit						49		49		49		49		196			
		3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan meubelair	jenis						0	0	0	0	6	8,000,000.00	6	8,000,000.00	6	16,000,000.00		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit						6		6		6		6		24			
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis						0	29,100,000.00	25	20,500,000.00	25	20,000,000.00	25	20,000,000.00	6	89,600,000.00		

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					6		6		6		6		24			
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung					1	214,696,482.00	1	73,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	437,696,482.00		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit					1		1		1		1		1			
		3.25.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%					100	0	100	0	100	19,500,000.00	100	20,000,000.00	100	39,500,000.00		
		3.25.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok					1	0	1	0	1	19,500,000.00	1	20,000,000.00	4	39,500,000.00		
				Jumlah promosi pelayanan publik PD	kali					0		0		1		1		2			

				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	Lapo ran						1		1		1		1		1			
		3.25.03	PROGRA M PENGELO LAAN PERIKAN AN TANGKA P	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	ton						1553 0.5	730, 792, 916. 00	1593 4.3	533, 182, 693. 00	1636 4.5	498, 617, 657	1682 2.7	520, 537, 294	1682 2.7	2,28 3,13 0,56 0		
				Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	ton						15.96		16.6		17.59		19		19	-		
		3.25.03. 2.01	Pengelola an Penangka pan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genanga n Air Lainnya yang dapat Diusahak an dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	ton						1553 0.5	646, 494, 278. 00	1593 4.3	460, 288, 983. 00	1636 4.5	461, 355, 700. 00	1682 2.7	465, 355, 700. 00	1682 2.7	2,03 3,49 4,66 1.00		

				Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	ton						15.96		16.6		17.59		19		19			
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Update data perikanan tangkap	bulan						12	7,408,000.00	12	48,355,700.00	12	48,355,700.00	12	48,355,700.00	48	152,475,100.00		
				Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB PT yang mendapatkan fasilitasi pembelajaran rajungan	KUB PT						1	517,126,264.00	1	335,343,444.00	1	336,000,000.00	1	340,000,000.00	4	1,528,469,708.00		
				Jumlah KUBPT yang mendapatkan fasilitasi sarana penangkapan ikan	KUB PT						9		12		12		12		45			

				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit						150		150		150		150		600			
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Lokasi Penanaman Mangrove	lokasi						0	121,960,014.00	0	76,589,839.00	1	77,000,000.00	1	77,000,000.00	2	352,549,853.00		
				Jumlah Lokasi restocking benih ikan tawes	lokasi						0		1		1		1		3			
				Tersedianya alat keselamatan berlayar bagi KUBPT	buah						250		350		350		350		350			
				Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit						2		2		2		2		8			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	ton						15530.5	84,298,638.00	15934.3	123,335,605.00	16364.5	123,335,605.00	16822.7	123,335,605.00	16822.7	454,305,453.00		

		3.25.03. 2.02.03	Pelaksana an Fasilitasi Bantuan Pendanaa n, Bantuan Pembiaya an, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi BPAN	nelay an						0	5,829 ,936. 00	500	19,80 1,025 .00	500	19,80 1,025 .00	500	19,80 1,025 .00	1500	65,23 3,011 .00		
				Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi sehat nelayan	nelay an						0		100		100		100		300			
				Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usah a						2		2		2		2		8			
		3.25.04	PPROGR AM PENGELO LAAN PERIKAN AN BUDIDAY A	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton						979	2,05 4,36 9,44 5	1057	3,59 5,13 6,13 2	1141	3,36 2,07 1,53 3	1228	3,50 9,87 0,92 9	1228	12,5 21,4 48,0 39		
				Jumlah produksi garam rakyat	ribu ton						291		300		309		318		318	-		

		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton						979	941,122,009.00	1057	1,137,263,288.00	1141		1228		1228			
				Jumlah produksi garam rakyat	ribu ton						291		300		309		318		318			
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha budidaya perikanan yang difasilitasi untuk pengembangan budidaya	kelompok						20	898,451,795.00	6	1,053,938,670.00	6	1,053,938,670.00	6	1,053,938,670.00	38	4,060,267,805.00		
				Jumlah pembinaan/soialisasi/bimtek/edukasi budidaya/garam yang dilaksanakan	kali						2		2		2		2		8			
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok						5		5		5		5		20			

		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta magang/pelatihan/studi lapang ke sentra budidaya/garam daerah lain	orang						8	42,670,214.00	10	83,324,618.00	10	83,500,000.00	10	83,500,000.00	10	292,994,832.00		
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan , Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok						5		5		5		5		20			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton						979	913,247,436.00	1057	292,857,971.00	1141		1228		1228			

				Jumlah produksi garam rakyat	ribu ton						291		300		309		318		318			
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan data usaha perikanan budidaya	bulan						12	77,981,487.00	12	34,304,971.00	12	34,304,971.00	12	34,304,971.00	12	180,896,400.00		
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						1		1		1		1		4			
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan jalan produksi	paket						2	830,065,380.00	0	246,113,000.00	2	247,000,000.00	2	247,000,000.00	2	1,570,178,380.00		

				Jumlah pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	paket						1		0		1		1		3			
				Normalisasi saluran tambak	paket						2		0		2		2		2			
				Pembangunan BBI	paket						0		1		1		1		3			
				pembangunan kolam beton	paket						0		3		3		3		9			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit						8		8		8		8		32			
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring, pengamatan dan pengendalian lingkungan budidaya dan hama penyakit ikan	Kec						0	5,200,569.00	14	12,440,000.00	14	12,440,000.00	14	12,440,000.00	14	42,520,569.00		

				Pembinaan / temu lapang pengamatan dan pengendalian hamapenyakit ikan	Pemb udiay a						120		0		120		120		360			
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Doku men						28		28		28		28		112			
		3.25.06	PROGRA M PENGOLA HAN DAN PEMASAR AN HASIL PERIKAN AN	Persentase produksi perikanan yang diolah	%						19.5	313, 562, 947. 00	19.75	100, 000, 000. 00	20	93,5 17,2 25	20.2	97,6 28,3 18	20.2	604, 708, 489		
				Konsumsi ikan perkapita	kg/k apita /th						32.89		33.5		34.4		35.5		35.5	-		

				Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	produk						3		6		10		15		34	-		
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase produksi perikanan yang diolah	%						19.5	112,917,029.00	19.75	102,797,791.00	20		20.2		20.2			
				Konsumsi ikan perkapita	kg/kapita/th						32.89		33.5		34.4		35.5		35.5			
				Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	produk						3		6		10		15		34			
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Updating data usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan & survei konsumsi ikan	Kec						14	112,917,029.00	14	102,797,791.00	14	102,797,791.00	14	102,797,791.00	14	421,310,402.00		

				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Doku men						1		1		1		1		4			
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase produksi perikanan yang diolah	%						19.5	174,134,118.00	19.75	122,664,003.00	20		20.2		20.2			
				Konsumsi ikan perkapita	kg/kapita/th						32.89		33.5		34.4		35.5		35.5			
				Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	produk						3		6		10		15		34			

		3.25.06. 2.02.01	Pelaksana an Bimbinga n danPener apan Persyarat an atauStand ar pada UsahaPen golahan dan Pemasara nSkala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan poklahsar	orang						7	174,1 34,11 8.00	14	122,6 64,00 3.00		122,6 64,00 3.00		122,6 64,00 3.00		542,1 26,12 7.00		
				Jumlah Packaging yang diterima pengolah ikan	prod uk						70		0		70		70		210			
				Jumlah Peserta Gathering Bayer Meet Seller Usaha Perikanan	peser ta						50		0		50		50		150			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengemasan produk perikanan(pac kaging)	peser ta						70		0		70		70		210			

				Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha						1		1		1		1		1				
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan yang diolah	%						19.5	26,5 11,8 00.0 0	19.75	72,1 07,3 91.0 0	20	78,8 00,0 00.0 0	20.2	88,8 00,0 00.0 0	20.2	266, 219, 191. 00			

		3.25.06. 2.03.02	Pemberia n Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah kelompok yang menerima sarana pengolahan hasilperikanan	Kelo mpok						3	26,51 1,800 .00	5	33,79 9,571 .00	5	33,80 0,000 .00	5	33,80 0,000 .00	18	127,9 11,37 1.00		
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Terfasilitasi	Pelak u Usah a						1		1		1		1		4			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif”**. Indikator kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPM D (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,44	4,76	-0,11	3,75	4,51	5,01	5,25	5,25
S. 6 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS.17	% pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan, perikanan	11.382.306,80	11.924.253,90	11.910.655,10	12.357.304,67	12.914.619,11	13.561.641,52	14.273.627,70	14.273.627,70

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Sampang, 2022

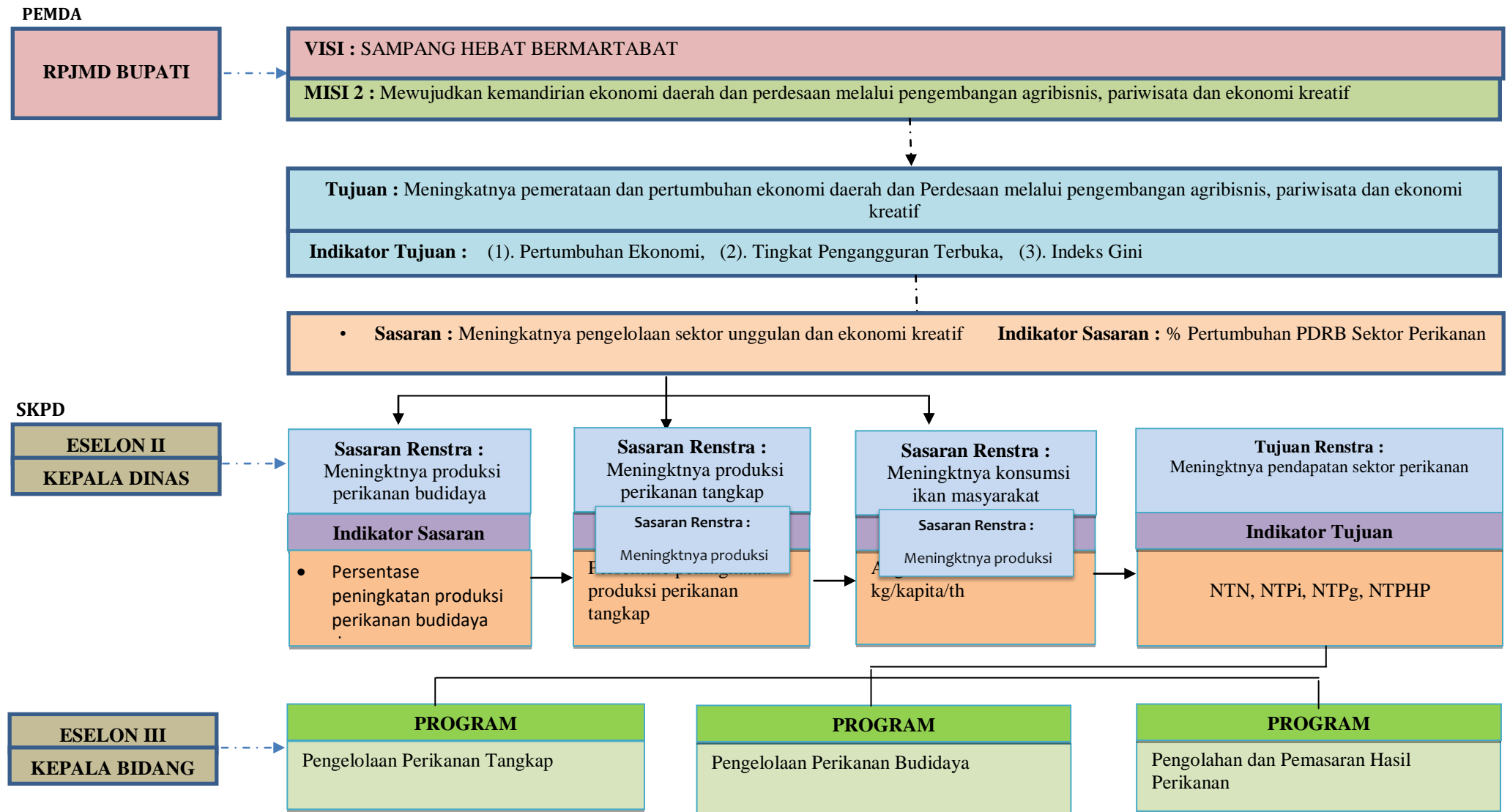
Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

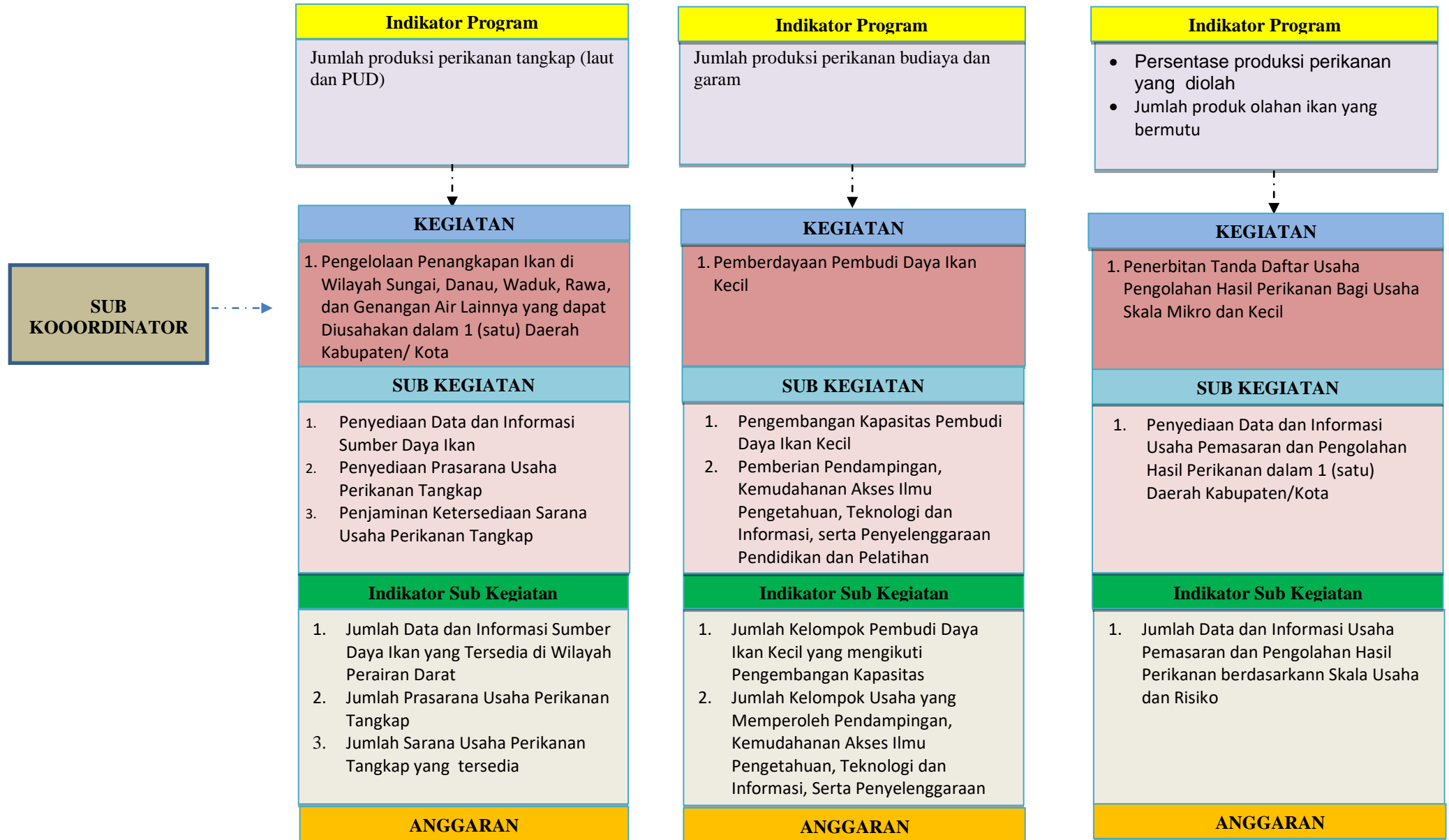
SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB					11.382.306,80	11.924.253,90	11.910.655,10	12.357.304,67	12.914.619,11	13.561.641,52	14.273.627,70	14.273.627,70
		Meningkatnya Pendapatan sector perikanan	NTN			n/a	101,9	102,4	103,0	103,7	104,6	105,6	105,6
			NTPi			n/a	101	103	105	107	109	111	111
			NTPG			n/a	113	115	117	119	121	123	123
			NTPHP			n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Garam								
					a. Budi daya	22,05	3,93	2,98	2,89	3,37	2,72	2,65	2,65
					b. Garam	103,24	-99,92	2,91	2,83	3,09	3,00	2,91	2,91

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								
					a. Laut	34,03	5,68	1,50	2,11	2,90	2,79	2,79	2,79
					b. PUD	-13,99	15,38	2,38	2,33	4,55	6,52	10,20	10,20
				Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka konsumsi ikan kg/kapita /tahun	n/a	5,75	7,75	9,75	11,75	13,75	15,75	15,75

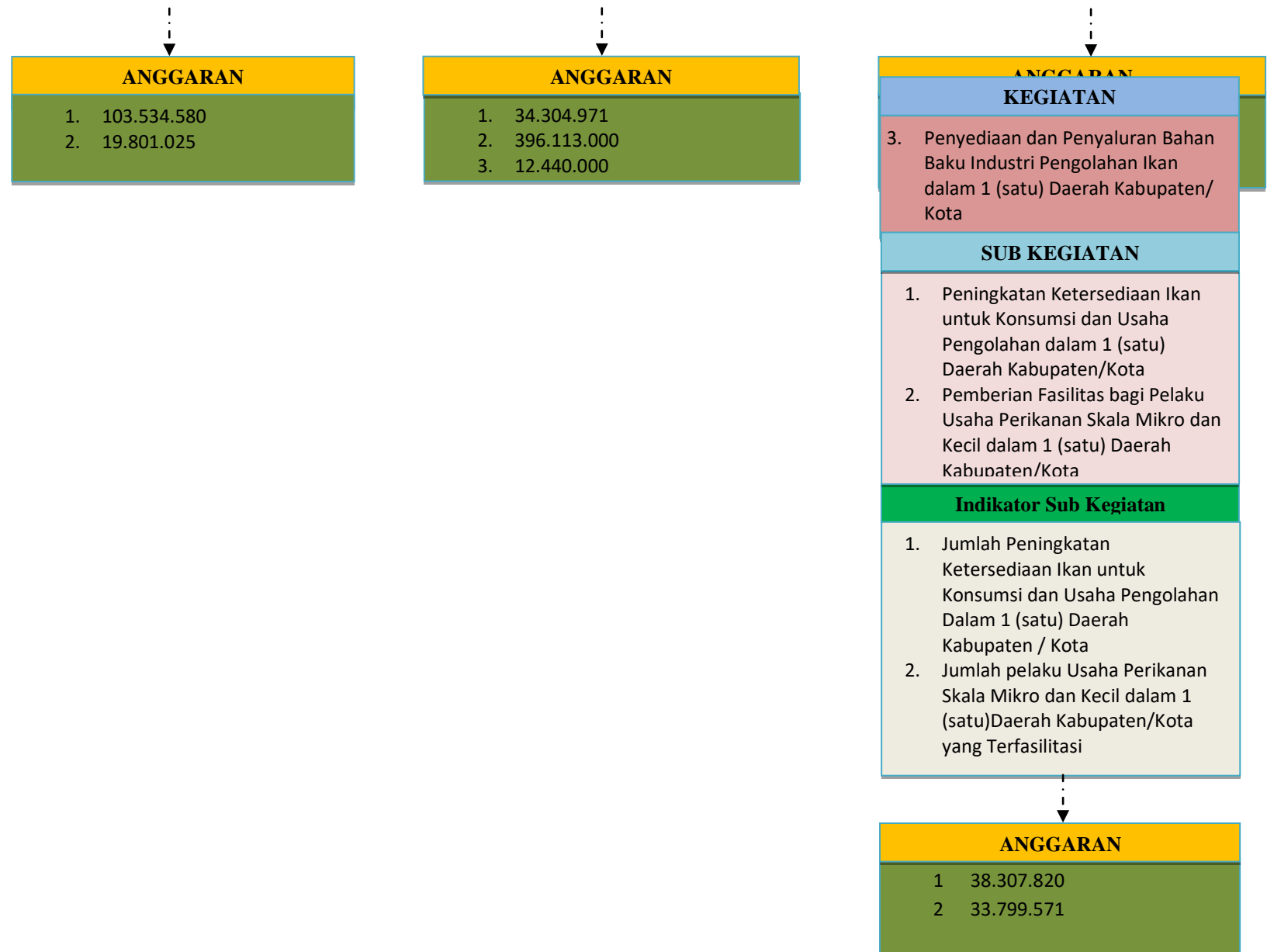
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.3
Cascading Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang





SUB KOOORDINATOR			
	1. 48.355.700,00 2. 335.343,.444,00 3. 76.589.839.,00	1. 1.053.938.670,00 2. 83.324.618,00	1. 102.797.791,00
	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
	2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	1. Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya 2. Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Jumlah Prasarana Peembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 3. Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang teruji melalui Pengeloolaan Kesehatan Ikan	1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko



Tabel 7.4
Indikator Kinerja Daerah PMDN 17

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN KINERJA					Standart	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
III	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan								
	Persentase pertumbuhan PDRB sector perikanan	%	6,12	6,57	4,13	-0,24	4,82	5,36	Belum Tercapai
	Produksi Perikanan Tangkap*	ton	7.561,44	6.986,75	9.354,45	14.154,20	15.167,10		
	Produksi Perikanan Budidaya*	ton	8.103,28	1.386,96	800	840,42	1.050,52		


BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang.

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan Perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Sampang, 5 September 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sampang

WAHYU PRIHARTONO, MM
NIP. 19651229 199403 1 002